



KORAN	HAL
Haluan	1/7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Korupsi “Trans Galugua” Jerat Tersangka Baru

**LIMAPULUH KOTA, HALUAN —** Polisi menetapkan tersangka baru berinisial BJ, dalam kasus dugaan korupsi proyek transmigrasi di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota. BJ menyusul AZD dan MLV, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada proyek pembangunan rumah trans senilai Rp3,7 miliar itu, yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp900 juta.

Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Sri Wihowo, melalui Kasat Reskrim, AKP Anton Luther, menyebutkan, BJ dalam kasus pengadaan rumah transmigrasi ini bertindak selaku kontraktor pembangunan. Sementara dua tersangka sebelumnya berstatus sebagai oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Limapuluh Kota.

Melalui Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Limapuluh Kota, kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah itu. Satu orang tersangka baru tersebut inisial BJ, merupakan rekanan kontraktor dalam proyek tersebut.

“Untuk BJ ini, akan dijadwalkan kembali lanjutan pemeriksaannya sebagai tersangka dalam waktu dekat. Sementara itu, satu orang lain berinisial CP selaku pelaksana proyek, juga akan kami periksa pekan depan sebagai saksi,” sebut AKP Anton Luther, didampingi Kasubag Humas, AKP Yuhelman dan KBO Satreskrim, IPTU Army Ariosa, Kamis (13/2).

>> KORUPSI hal 07

## Korupsi ..... Dari Halaman. 1

Ia menerangkan terkait dua tersangka sebelumnya, tersangka AZD merupakan mantan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Limapuluh Kota, sementara MLV adalah oknum PNS yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek transmigrasi tersebut.

“Keduanya sudah ditahan dan terus didalami. Jika perlu nanti, masa penahanan akan diperpanjang. Sebelumnya, AZD ini telah menjalani tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dan satu kali sebagai tersangka,” sebutnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, AKP Anton Luther didampingi Kanit Tipikor Ipda Heri Yulardi menyebutkan, kasus ini berawal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap proyek transmigrasi di Nagari Galuguan, Kecamatan Kapur IX, yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp900 juta.

Proyek yang dimaksud itu

adalah terkait pengerjaan pembangunan perumahan transmigrasi dengan anggaran senilai Rp3,7 miliar pada tahun 2013, yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Limapuluh Kota.

### Rumah Tak Tuntas

Berdasarkan informasi yang dirangkum *Haluan*, proyek pembangunan rumah transmigrasi di Jorong Koto Tengah, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota itu terindikasi sebagai proyek akal-akalan yang tujuan untuk melakukan perambahan hutan. Proyek yang telah dicanangkan sejak 2010 itu bahkan hingga saat ini tak selesai. Awalnya, proyek yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu dialokasikan untuk pembangunan 200 unit rumah transmigrasi yang akan dihuni korban gempa bumi dan letusan gunung dari sejumlah daerah di tanah air pada 2009.

Dugaan proyek tersebut sebagai proyek akal-akalan peram-

bahan hutan semakin menguat tatkala Kapolres Limapuluh Kota saat itu, AKBP Cucuk Trihono, bersama tim ekspedisinya turun melakukan penyisiran ke kawasan pembangunan.

Polisi bersama awak media melihat secara jelas ratusan hektare lahan yang telah gundul. Sebuah perusahaan di lokasi tersebut memang telah memiliki Izin Pengelolaan Kayu (IPK) yang dikeluarkan Kementerian terkait guna menyokong proyek pembangunan rumah transmigrasi nasional di lokasi tersebut. Namun, ditaksir, kayu yang sudah ditebang mencapai belasan ribu kubik.

Bahkan, di lokasi sengaja dibangun sawmill (penggergajian kayu). Kendati pemilik IPK mengantongi izin resmi dalam penebangan hutan, tetapi terdapat dugaan kayu itu pernah diselundupkan ke Riau lewat aliran sungai. Buktinya, saat Kapolres dan jajaran meninjau ke lokasi, ditemukan ratusan hingga ribuan kubik kayu hasil olahan di sawmill tersebut. (h/zkf)